

(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

ERP Prioritas di 25 Jalan

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Pol Latif Usman, mengatakan rencananya *electronic road pricing* (ERP) atau jalan berbayar akan diprioritaskan di 25 jalan Jakarta guna mengatasi kemacetan lalu lintas. "Tujuan ERP agar lalu lintas berjalan lancar," kata Latif. Di antara 25 titik adalah Jalan Sudirman dan Jalan HM Z Thamrin, serta Jalan Rasuna Said.

Latif mengatakan sudah berkoordinasi sejak lama dengan Pemprov DKI untuk pengaturan volume kendaraan di setiap jam operasional. Latif menambahkan, nantinya Polda Metro akan dilibatkan dalam penerapan kebijakan ERP di lapangan. Di samping itu, bersama Dinas Perhubungan membuat kajian merumuskan peraturan tersebut. "Kami sedang membuat kajian bersama Dishub soal aturan ERP," ucap Latif.

Direktur Eksekutif Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menambahkan kebijakan ERP merupakan salah satu upaya membatasi pergerakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. "Warga didorong beralih naik transportasi publik," kata Nirwono.

Menurut Nirwono, DKI juga harus mempercepat penyediaan transportasi publik yang memadai, terpadu, dan terjangkau. Selama biaya transportasi publik masih mahal, sulit mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Nirwono menambahkan, pe-

nerapan ERP masih perlu diuji coba dulu secara bertahap efektivitasnya dalam membatasi kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan sebelum diterapkan menyeluruh.

"Sosialisasi yang masif sangat diperlukan agar tidak mendapat resistensi masyarakat luas," ungkap Nirwono. Se mentara itu, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menjelaskan biaya tarif ERP bakal masuk ke kas daerah. Uang ter-

« Sosialisasi yang masif sangat diperlukan agar tidak mendapat resistensi masyarakat luas. »

NIRWONO JOGA

Direktur Eksekutif Studi Perkotaan

sebut sangat bermanfaat dan harus dikembalikan ke masyarakat seperti untuk subsidi angkutan umum.

Djoko mengatakan perlu dibedakan tarif jam sibuk dan tidak. Dia yakin ERP lebih baik daripada ganjil genap untuk mengurangi kemacetan. "Ganjil genap tidak efektif. ERP selain efektif, DKI juga mendapat uang," ujar Djoko. Adapun usul Dishub DKI soal besaran tarif kisaran 5 ribu hingga 19 ribu, menyesuaikan kategori dan jenis kendaraan. ■ **jon/G-1**